

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ini ialah program bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dengan menggunakan e-voucher dalam proses pencairan bantuannya. Jadi untuk setiap KPM (keluarga Penerima manfaat) dari bantuan ini akan menerima kartu KKS atau dapat disebut sebagai ATM bantuan yang akan menerima tranferan dana anggaran dari pemerintah untuk setiap bulannya. Kemudian kartu KKS tersebut dapat digunakan untuk melakukan pencairan dan penukaran dengan bahan pangan di agen e-warung yang telah berkerja sama dengan bank penyalur bantuan. Sistem bantuan seperti diatas merupakan sistem bantuan yang baru di Indonesia, dan asing bagi masyarakat, yang notabennya merupakan masyarakat yang masih tradisional dan masih menggunakan sistem-sistem kerja manual dengan pemahaman terhadap ilmu teknologi yang masih minim.

#### 1. Masalah yang ditemukan dalam penyaluran BPNT di Desa Sidomulyo

Dalam penyaluran bantuan dari pemerintah bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi masalah, apalagi jika sistem penyaluran dalam bantuan tersebut merupakan sistem bantuan yang baru dan asing bagi masyarakat. Tentu masalah-masalah yang timbul akan berpengaruh kepada bagian lain yang memiliki hubungan dengan bagian. Seperti pandangan Robert K. Meton yang melihat bahwa masyarakat seperti layaknya sistem yang saling berhubungan jika terjadi ketidak berfungsi di salah satu sistem akan berpengaruh kepada

bagian yang lain.

Masalah-masalah yang ada dalam proses pencairan BPNT di desa Sidomulyo ialah, KPM tidak dapat mencairkan bantuan karena mengalami kekosongan saldo, penerimaan bantuan program BPNT terhadap KPM yang meninggal dunia tidak dapat dilanjutkan, masalah timbul apabila KPM yang meninggal merupakan KPM dengan keadaan ekonomi yang masih rentan, rusaknya kartu KKS dari KPM, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan KPM mengenai cara menyimpan kartu elektronik seperti kartu KKS BPNT, data ganda dalam daftar penerima BPNT, dan terdapatnya ketidaktepatan sasaran penerima yang menimbulkan kecemburuan sosial. Masalah –masalah tersebut muncul dikarenakan adanya ketidak berfungsi dalam salah satu sistem program BPNT ini, yang mana dengan timbulnya masalah-masalah ini artinya sedang terjadi anomie di masyarakat.

## 2. Dampak masalah dalam penyaluran BPNT terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Sidomulyo.

Dampak dari masalah-masalah yang timbul dalam penyaluran BPNT di Desa Sidomulyo ini juga bermacam-macam. Untuk masalah kekosongan saldo, pemberhentian bantuan untuk KPM yang telah meninggal, dan rusaknya kartu KKS ini berdampak kepada KPM dengan tidak dapat melakukan pencairan BPNT. Untuk masalah data ganda, ketidaktepatan sasaran penerima dan belum maksimalnya penanganan penyelesaian masalah, juga menimbulkan dampak di masyarakat dengan terjadinya kecemburuan sosial diantara masyarakat yang tidak menerima bantuan, keresahan di masyarakat, timbulnya kecurigaan dan

ketidakpercayaan kepada pihak-pihak yang menangani program BPNT termasuk pemerintah desa dan e-warung, serta juga menculnya ucapan-ucapan yang mengarah kepada ujaran provokasi.

Respon yang di tunjukan oleh masyarakat dengan adanya masalah yang timbul ataupun keadaan anomni yang mereka hadapipun juga bermacam-macam terdapat masyarakat yang menerima dan tetap mengusahakan untuk penerimaan bantuan BPNT tersebut (conformity), pun ada juga masyarakat yang menggunakan cara yang sama sekali berbeda dengan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah (Rebellion).

### **3. Saran**

Pergantian sitem pendistribusian bantuan pangan oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan efektivitas bantuan pangan bagi masyarakat merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat laju kesejahteraan bagi rakyatnya. Pergantian sistem penyaluran bantuan pangan tradisional manual dengan sistem kerja mekanisme perbankan merupakan satu terobosan baru dalam sitem bantuan di Indonesia.

Namun alangkah lebih baiknya jika pembaruan sistem bantuan pangan dengan menggunakan mekanisme baru ini juga dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat penerima bantuan yang akan terlibat dengan sistem tersebut, agar dalam keberlanjutan dan berjalannya program bantuan ini tidak akan menimbulkan masalah yang justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

